

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

2.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bintan Tahun 2005-2025

2.1.1. Visi Jangka Panjang

Visi pembangunan Kabupaten Bintan yang akan dicapai dalam dua puluh tahun mendatang (RPJP 2005-2020) adalah :

“BINTAN GEMILANG 2025”
GERAKAN MELANGKAH MAJU DI BIDANG KELAUTAN, PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN

Penjabaran pernyataan Visi di atas adalah sebagai berikut :

- a) Gemilang 2025: Memiliki arti “Gerakan Melangkah Maju”, gerakan yang dimaksud merupakan gerakan pembangunan yang dilakukan secara terencana dan bertahap untuk lebih maju yang melibatkan secara aktif seluruh pihak di Kabupaten Bintan dengan jangka waktu target capaian sampai tahun 2025.
- b) Kelautan : Segala hal yang berkaitan dengan wilayah laut dan pantai, dengan mengoptimalkan seluruh kegiatan yang terkait dengan industri maritim, dimulai dari perikanan, marine industries, pelabuhan dan transportasi laut, mengingat kelautan sebagai core daerah, dengan luasan kabupaten Bintan 98,5% terdiri dari wilayah laut;
- c) Pariwisata : Segala hal yang berhubungan dengan kegiatan wisata atau perjalanan untuk rekreasi, dalam skala industri dan kerakyatan dengan berfokus pada ekowisata;

- d) Kebudayaan : Merupakan kegiatan melestarikan dan memajukan seluruh hasil kegiatan dan penciptaan akal budi masyarakat seperti kesenian, dan adat istiadat dengan bersandar pada Budaya Melayu.

Tujuan akhir dari penancangan visi daerah tersebut adalah mewujudkan masyarakat Bintan Yang Sejahtera. Sejahtera dalam hal ini memiliki dimensi lahir maupun batin, dimana Sejahtera Lahir diartikan terpenuhi segala kebutuhan lahiriah dan kehidupan ekonomi masyarakat, terpenuhi sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Sedangkan Sejahtera Batin diartikan terpenuhi kebutuhan rohaniah masyarakat dengan berlandaskan kehidupan beragama dan budaya. Dari sisi pembangunan untuk mencapai masyarakat sejahtera, perlu pengembangan kegiatan ekonomi sesuai potensi dan keunggulan kabupaten Bintan, yaitu sektor kelautan dan pariwisata sebagai core dan sekaligus sebagai driver activity. Pembangunan yang dilaksanakan diharapkan mampu membawa dampak kemajuan daerah yang berkelanjutan, mampu tumbuh dan berkembang serta mengarah pada sistem ekonomi yang modern tetapi tetap peduli terhadap keberlanjutan sumber daya unggulan daerah dan pelestarian lingkungan.

2.1.2. Misi Jangka Panjang

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut :

- a) Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumberdaya pendidikan yang handal;
- b) Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan;
- c) Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif;
- d) Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.

2.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015

Pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap daerah pada setiap tahun anggaran seyogyanya berdasarkan hasil evaluasi pembangunan pada tahun anggaran sebelumnya. Dari hasil evaluasi tersebut dapat diidentifikasi permasalahan yang selanjutnya dijadikan bahan untuk perencanaan pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan, selanjutnya disusun suatu arah pembangunan yang ditujukan untuk memecahkan permasalahan melalui intervensi pembangunan yang dituangkan ke dalam kebijakan pembangunan yang bersifat jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bintan pada tahun 2013 berpedoman Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015, yang merupakan pedoman operasional pembangunan, untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian, serta evaluasi bagi pelaksanaan pembangunan dalam mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

2.2.1. Visi RPJMD Tahun 2010-2015

Visi Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 adalah :

” Menuju Bintan Yang Maju, Sejahtera dan Berbudaya ”

makna dari visi dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Bintan Yang Maju: Bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik didukung oleh sumberdaya manusia yang unggul. Maju juga diarahkan pada terbentuknya daerah yang Mandiri berbasis pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan beserta segenap potensinya secara berkelanjutan, namun

tetap mengedepankan pentingnya kerjasama dan sinergitas.

- 2) Sejahtera : Menunjukkan kondisi kemakmuran masyarakat Bintan yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) dan spiritualnya.
- 3) Berbudaya : Perwujudan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai budaya yang harus dijaga kelestariannya sebagai pedoman pengembangan masyarakat. Perwujudan masyarakat yang memiliki sifat dan sikap yang terpuji dalam kehidupan sosial ekonomi, memiliki moral yang tinggi serta menjunjung norma-norma agama dan norma-norma adat yang berlaku.

2.2.2. Misi RPJMD Tahun 2010-2015

Usaha-usaha perwujudan visi Kabupaten Bintan 2015 dijabarkan dalam misi pembangunan Bintan tahun 2011– 2015 sebagai berikut :

- 1) Melanjutkan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berdaya saing, berbudaya serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Mewujudkan pembangunan perekonomian daerah yang berbasis pada pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- 3) Melanjutkan pengembangan potensi pariwisata dan agribisnis.
- 4) Melanjutkan upaya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance), demokratis dan bertanggung jawab didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM.
- 5) Melanjutkan pembangunan yang adil dan merata melalui peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang perkembangan di seluruh wilayah Kabupaten Bintan.
- 6) Melanjutkan upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan kearifan lokal dan pengarusutamaan gender.
- 7) Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (Sustainable Development).

2.2.3. Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran bersifat inheren dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut.

MISI 1. Melanjutkan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berdaya saing, berbudaya serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi
1.	Peningkatan kualitas kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat Bintan.	Meningkatnya toleransi antar umat beragama yang ditandai dengan tidak adanya kasus perselisihan antar umat beragama	Meningkatkan kualitas, pemahaman, pengamalan agama dan kerukunan umat bergama.
			Menciptakan kerukunan umat beragama secara fisik dan non fisik.
2.	Perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat Bintan	Terpenuhinya standar aturan ketenaga kerjaan	Meningkatkan perlindungan dan pengawasan sistem ketenagakerjaan
			Menurunkan angka perselisihan pengusaha dan pekerja
		Menurunnya angka pengangguran terbuka dari 9,94% menjadi 5,00%	Meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja di sektor unggulan yang akan dikembangkan dan peluang kerja di sektor perikanan, pariwisata dan industri.
			Meningkatkan peluang kerja bagi penduduk lokal di Kab. Bintan.
			Melanjutkan upaya peningkatan kapasitas tenaga kerja
3.	Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat	Terpenuhinya standar/ketentuan nasional pendidikan	Meningkatkan lapangan pekerjaan serta memberikan insentif untuk membuka lapangan pekerjaan.
			Meningkatkan Angka Partisipasi P A U D dan Mempertahankan Rasio Guru-Muridnya

	Bintan.	anak usia dini serta pendidikan dasar dan pendidikan menengah	Meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan Dasar Mempertahankan Pemenuhan Kebutuhan Penduduk akan Sekolah dan Guru Pendidikan Dasar
			Meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan Menengah Meningkatkan mutu pendidikan menengah yang berbasis kompetensi Menyediakan Fasilitas Pendidikan Informal Meningkatkan Peran Pemuda dan Olahraga Membina dan mengembangkan olah raga Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian nilai seni dan budaya daerah	Meningkatkan sarana kesenian serta pembinaan dan perlindungan seni budaya daerah
		Terlindunginya peninggalan sejarah dan warisan budaya melalui Peraturan Daerah	Penetapan Peraturan Daerah tentang perlindungan Benda, situs dan kawasan cagar budaya
4.	Peningkatan kualitas kesehatan Masyarakat Bintan	Terpenuhinya pelayanan kesehatan sesuai standar	Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat, gizi serta kesehatan keluarga Meningkatkan kesehatan keluarga Meningkatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan Meningkatkan kuantitas tenaga ahli kesehatan

			Memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat miskin
			Mempromosikan pentingnya kesehatan kepada masyarakat
			Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, dan alat kesehatan serta menjamin keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan
			Mengawasi dan membina peredaran obat
			Meningkatkan Manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdaya guna dan berhasil guna

MISI 2. Mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang berbaasis pada pengembangan suber daya kelautan dan perikanan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi
1.	Pembentukan iklim yang kondusif bagi penanaman modal untuk kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Bintan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan manusia serta pola tata ruang daerah dan mendorong perkembangannya agar lebih efisien dan mampu bersaing. (customer)	Meningkatnya persentase koperasi aktif dari 79,15% menjadi 82,80% serta pertumbuhan rata- rata UMKM sebesar 3,77% pertahun	Memberdayakan koperasi dan UMKM serta Mengembangkan kewirausahaan UKM
		Meningkatnya unit usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebesar 150%	Meningkatkan kualitas dan kuantitas IKM dan mutu produk IKM
			Meningkatkan kerjasama investasi di Kabupaten Bintan

2.	Pengembangan kawasan minapolitan dengan memanfaatkan sumberdaya perikanan dan kelautan secara optimal, adil dan berkelanjutan melalui pengembangan sarana dan prasarana penunjang minapolitan (core)	Terbentuknya kawasan minapolitan di 3 lokasi yang terletak di Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Mantang dan Kecamatan Bintan Timur	Mengembangkan kawasan minapolitan dan meningkatkan produktifitas sektor kelautan perikanan.
3.	Peningkatan produksi dan produktivitas serta nilai tambah sektor kelautan dan perikanan.	Meningkatnya kontribusi sektor perikanan dalam PDRB sebesar 8 %	Meningkatkan perekonomian dengan memanfaatkan potensi daerah
4.	Peningkatan kapasitas pelayanan dan pengelolaan perkantoran	Meningkatnya kapasitas pelayanan aparatur sesuai standar	Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana, sumber daya manusia, dan kinerja aparatur

MISI 3. Melanjutkan pengembangan potensi pariwisata dan agribisnis

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi
1.	Pengembangan kawasan pariwisata melalui pengembangan sarana dan prasarana, promosi, pelayanan dengan tetap memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup (core)	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB dari 19,76% menjadi 21,61%	Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan Meningkatkan daerah tujuan wisata
2.	Pemanfaatan potensi alam yang ada disertai dengan	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dari 5.78%	Meningkatkan produksi tanaman perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura serta peternakan

	pemberdayaan pengelolaannya guna pemenuhan kebutuhan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (core)	menjadi 8,00% dan Nilai Tukar Petani dari 100,72 % menjadi 105 %	Meningkatkan produktifitas dan kualitas komoditas sektor peternakan Meningkatkan produktifitas dan kualitas komoditas sektor peternakan
			Menyediakan dan mengembangkan prasarana dan sarana pertanian
3.	Meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan petani dan nelayan	Meningkatnya Rata-rata pendapatan petani dari Rp1,35 juta menjadi Rp2,17 juta	Meningkatkan kapasitas kelembagaan, keterampilan dan pengembangan teknologi bagi petani dan nelayan

MISI 4. Melanjutkan upaya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance), demokratis dan bertanggung jawab didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
1.	Peningkatan kualitas aparatur pengawasan, pembinaan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah dalam usaha pemanfaatan, pengelolaan potensi wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (control)	Meningkatnya kualitas pelayanan teknis administratif bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan regulasi yang berlaku	Meningkatkan kapasitas, ketatalaksanaan dan kelembagaan daerah Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
		Meningkatnya Kompetensi sumberdaya aparatur dari 40% menjadi 80%	Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur
		Meningkatnya efektifitas pengelolaan administrasi kepegawaian daerah dari 76,66% menjadi 86,66%	Meningkatkan efektifitas pengelolaan administrasi kepegawaian daerah
		Meningkatnya kinerja aparatur dari 40% menjadi 80%	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan sumberdaya aparatur

		Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja pemerintah daerah yang ditandai dengan opini LAKIP Daerah dari C menjadi A	Meningkatkan kualitas aparatur pengawasan dan pembinaan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah
		Meningkatnya penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil dari 64,40% menjadi 85%	Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas aparatur
			Meningkatkan jumlah jaringan sistem kependudukan di seluruh kecamatan
		Meningkatnya kinerja pemerintah dalam penyelesaian permasalahan di masyarakat dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku	Menyusun data dan informasi kependudukan yang akurat serta meningkatkan pelayanan kependudukan dan catatan sipil
			Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan
			Mempertahankan keberhasilan aparatur pemerintah dalam melayani warga
			Menata peraturan perundang-undangan
			Menata pemanfaatan dan pemilikan lahan
			Meningkatkan kualitas sistem administrasi perekonomian dan pembangunan
			Membina BUMD untuk menjadi penggerak ekonomi daerah
			Meningkatkan sistem administrasi pembangunan daerah
2.	Pengembangan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan	Meningkatnya pembinaan masyarakat di kecamatan	Meningkatkan kualitas sistem administrasi umum
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan kecamatan dari 90% menjadi 100%	Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan kemasyarakatan
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musrenbang
3.	Peningkatan fungsi dan peranan	Meningkatnya produk legislasi daerah yang	Meningkatkan kualitas anggota legislatif dan kapasitas lembaga

	lembaga perwakilan rakyat daerah	disahkan dari 63,64% menjadi 100%	DPRD
4.	Perencanaan pembangunan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, Sumberdaya yang ada dan kebutuhan penduduk serta memperhatikan mitigasi bencana. (core)	Meningkatnya kesesuaian muatan perencanaan daerah dengan implementasinya dari 70% menjadi 90%	Meningkatkan kualitas data perencanaan daerah Meningkatkan kapasitas perencanaan spasial Meningkatkan perencanaan dan pengendalian pembangunan SDA Meningkatkan kapasitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah Meningkatkan kualitas lembaga dan tenaga perencana daerah Meningkatkan kemampuan perencanaan daerah bawahan Mempertahankan keberhasilan perencanaan pembangunan daerah Meningkatkan pembangunan ekonomi daerah Meningkatkan pembangunan manusia
5.	Peningkatan kesiapan daerah dalam menghadapi bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan awal bencana	Menyediakan rencana aksi penanggulangan bencana daerah serta peningkatan kepedulian masyarakat dalam menghadapi bencana Menangani kejadian bencana sosial
6.	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Membaiknya opini laporan keuangan daerah dari WDP menjadi WTP	Meningkatkan mutu laporan keuangan dan ketaatan terhadap standar pengelolaan keuangan daerah
7.	Peningkatan kemampuan pembiayaan pembangunan daerah	Meningkatnya penerimaan daerah sebesar 60,4% yaitu dari 429,63 miliar menjadi 711,25 miliar	Meningkatkan penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak
8.	Peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa serta nilai-nilai demokrasi	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dari 49,4% menjadi 60%	Mengembangkan wawasan kebangsaan dan kesadaran politik masyarakat

9.	Peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Bintan	Menurunnya indeks kriminalitas dari 112 menjadi 105	Mengendalikan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan peraturan daerah
			Mengembangkan kapasitas penegak hukum
			Membina masyarakat untuk ketahanan dan perlindungan
10.	Peningkatan kualitas arsip dan perpustakaan daerah	Meningkatnya persentase kearsipan daerah dari 5% menjadi 80% dan berkembang nya minat baca masyarakat	Meningkatkan dan Mengembangkan Kapasitas Lembaga Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
			Mengembangkan perpustakaan daerah
11.	Peningkatan kesehatan, kesejahteraan dan ketahanan keluarga	Menurunnya jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I dari 23,64% menjadi 22,49%	Meningkatkan jumlah keluarga sejahtera
			Meningkatkan ketahanan keluarga

MISI 5. Melanjutkan pembangunan yang adil dan merata melalui peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang perkembangan di seluruh wilayah Kabupaten Bintan.

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi
1.	Peningkatan keandalan sistem/jaringan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman Kabupaten Bintan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas jaringan jalan, jembatan, dan drainase	Membangun dan Merehabilitasi Jalan, Jembatan, Drainase dan Gorong-Gorong
			Memelihara jalan dan jembatan
			Meningkatkan sistem drainase
			Mengembangkan sarana & prasarana perumahan & permukiman
			Mengembangkan pelayanan air minum dan air limbah
			Mengendalikan dampak banjir
			Meningkatkan perencanaan teknis dan dokumen rencana bidang kepekerjaan umum
			Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana umum dan aparatur pemerintahan

			Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana ibukota
			Meningkatkan utilitas penerangan di kawasan ruang terbuka
2.	Penyediaan energi listrik bagi masyarakat Kabupaten Bintan	Meningkatnya rumah tangga yang terlayani kebutuhan listrik dari 60,38% menjadi 65%	Menyediakan jaringan dan pembangkit listrik bagi masyarakat
		Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana wilayah	Meningkatkan Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana wilayah
			Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
			Meningkatkan kualitas kebijakan bidang perhubungan
			Meningkatkan pelayanan angkutan umum
			Meningkatkan konsolidasi dan koordinasi kepada institusi jasa pos dan telekomunikasi
			Meningkatkan pembinaan dan pengawasan bidang kebandar-udaraan

MISI 6. Melanjutkan upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan kearifan lokal dan pengarusutamaan gender

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
1.	Pengembangan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan potensi sumberdaya alam dengan optimal. (culture)	Menurunnya persentase penduduk miskin dari 11% menjadi 8%	Menurunkan jumlah penduduk miskin dengan meningkatkan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
		Menurunnya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial dari 6,98% menjadi 6,21	Meningkatkan bantuan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
			Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat
			Meningkatkan kompetensi pekerja sosial dan tenaga kerja kesejahteraan sosial
2.	Pengembangan dan	Meningkatnya	Mengembangkan dan

	Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bintan	partisipasi masyarakat dalam pembangunan	memberdayakan masyarakat pedesaan
3.	Peningkatan Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan Daerah	Meningkatnya Indeks kesetaraan gender dari 24,45 menjadi 30,1	Meningkatkan Indeks kesetaraan gender

MISI 7. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (Sustainable Development)

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
1.	Penyusunan dan Penetapan struktur, pemanfaatan dan pengelolaan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil yang berwawasan lingkungan sebagai pedoman pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang multisektoral dan terpadu. (concequency)	Meningkatnya pengelolaan sumber daya kelautan Kabupaten Bintan	Menyusun struktur, pemanfaatan, dan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang berwawasan lingkungan
2.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bintan	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup dari 51,65% menjadi 59,79%	Memenuhi kualitas lingkungan hidup daerah yang sesuai standar Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan kualitas masyarakat dalam mengelola SDA dan Lingkungan Hidup Meningkatkan pengendalian Lingkungan Hidup
3.	Pembentukan Kabupaten Bintan daerah yang bersih hijau, dan asri	Meningkatnya persentase sampah yang ditangani dari 20,50% menjadi 100%	Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan

		Meningkatnya luas ruang terbuka hijau yang dikelola dari 1.500 M2 menjadi 17.226 M2	Meningkatkan/ Mempertahankan luas ruang terbuka hijau dan pengelolaan tempat pemakaman umum
4.	Peningkatan kelestarian sumber daya hutan di Kabupaten Bintan	Menurunnya kerusakan hutan lindung dari 1658,8 Ha menjadi 9 Ha	Memantapkan dan meningkatkan upaya perlindungan hutan Meningkatkan fungsi DAS Meningkatkan inventarisasi dan dokumentasi sumber daya hutan
5.	Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Peningkatan pengawasan dan pembinaan usaha pertambangan dan pemanfaatan sumber daya air Peningkatan pembinaan dan pengawasan distribusi bahan bakar minyak dan gas bumi

2.2.4. Arah Kebijakan Pembangunan

Strategi harus dirumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan suatu strategi dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Urut-urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan. Memperjelas kapan suatu sasaran dapat dicapai dari waktu ke waktu.

MISI 1. Melanjutkan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berdaya saing, berbudaya serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

No.	Sasaran Pokok/ Target Kinerja	Arah Kebijakan				
		Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
1	Meningkatnya toleransi antar umat beragama yang ditandai dengan tidak adanya kasus perselisihan antar umat beragama	Meningkatkan Kualitas, Pemahaman, Pengamalan Agama dan Kerukunan Umat Beragama				
		Menciptakan kerukunan umat beragama secara fisik dan non fisik				

No.	Sasaran Pokok/ Target Kinerja	Arah Kebijakan				
		Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
2	Menurunnya angka pengangguran terbuka dari 9,94% menjadi 5,00%	Meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja di sektor unggulan yang akan dikembangkan dan peluang kerja di sektor perikanan, pariwisata dan industri				
		Meningkatkan peluang kerja bagi penduduk lokal di Kabupaten Bintan				
		Melanjutkan upaya peningkatan kapasitas tenaga kerja				
		Meningkatkan lapangan pekerjaan serta memberikan insentif untuk membuka lapangan pekerjaan.				
3	Terpenuhinya standar/ketentuan nasional pendidikan anak usia dini serta pendidikan dasar dan pendidikan menengah	Meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Mempertahankan Rasio Guru-Muridnya				
		Meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan Dasar				
		Mempertahankan Pemenuhan Kebutuhan Penduduk akan Sekolah dan Guru Pendidikan Dasar				
		Meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan Menengah				
		Meningkatkan mutu pendidikan menengah yang berbasis kompetensi				
		Menyediakan Fasilitas Pendidikan Informal				
		Meningkatkan Peran Pemuda dan Olahraga				
		Membina dan mengembangkan olah raga				
		Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan				
4	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian nilai seni dan budaya daerah	Meningkatkan sarana kesenian serta pembinaan dan perlindungan seni budaya daerah				
5	Terlindunginya peninggalan sejarah dan warisan budaya melalui Peraturan Daerah	-	Penetapan Peraturan Daerah tentang perlindungan Benda, situs dan kawasan cagar budaya	-		
6	Peningkatan kualitas kesehatan Masyarakat Bintan	Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat, gizi serta kesehatan keluarga				
		Meningkatkan kesehatan keluarga				
		Meningkatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif				
		Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan				
		Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan				
		Meningkatkan kuantitas tenaga ahli kesehatan				
		Memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat miskin				
		Mempromosikan pentingnya kesehatan kepada masyarakat				

No.	Sasaran Pokok/ Target Kinerja	Arah Kebijakan				
		Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
		Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, dan alat kesehatan serta menjamin keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan				
		Mengawasi dan membina peredaran obat				
		Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdaya guna dan berhasil guna				

MISI 2. Mewujudkan pembangunan perekonomian daerah yang berbasis pada pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan

No.	Sasaran Pokok/ Target Kinerja	Arah Kebijakan				
		Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
1	Meningkatnya persentase koperasi aktif dari 79,15% menjadi 82,80% serta pertumbuhan rata-rata UMKM sebesar 3,77% pertahun	Memberdayakan koperasi dan UMKM serta Mengembangkan kewirausahaan UMKM				
2	Meningkatnya unit usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebesar 150%	Meningkatkan kualitas dan kuantitas IKM dan mutu produk IKM				
		Meningkatkan kerjasama investasi di Kabupaten Bintan				
3	Terbentuknya kawasan minapolitan di 3 lokasi yang terletak di Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Mantang dan Kecamatan Bintan Timur	Mengembangkan kawasan minapolitan dan meningkatkan produktifitas sektor kelautan perikanan				
4	Meningkatnya kontribusi sektor perikanan dalam PDRB sebesar 8%	Meningkatkan perekonomian dengan memanfaatkan potensi daerah				
		Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan sumberdaya kelautan				

MISI 3. Melanjutkan pengembangan potensi pariwisata dan agribisnis

No.	Sasaran Pokok/ Target Kinerja	Arah Kebijakan				
		Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
1	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB dari 19,76% menjadi 21,61%	Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan				
		Meningkatkan daerah tujuan wisata				
2	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dari 5,79% menjadi 7,21% dan Nilai Tukar Petani dari 100,72 % menjadi 105 %	Meningkatkan produksi tanaman perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura serta peternakan				
		Meningkatkan produktifitas dan kualitas komoditas sektor peternakan				
		Menyediakan dan mengembangkan prasarana dan sarana pertanian				

No.	Sasaran Pokok/ Target Kinerja	Arah Kebijakan				
		Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
3	Meningkatnya Rata-rata pendapatan petani dari Rp1,35 juta menjadi Rp2,17 juta	Meningkatkan kapasitas kelembagaan, keterampilan dan pengembangan teknologi bagi petani dan nelayan				

MISI 4. Melanjutkan upaya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance), demokratis dan bertanggung jawab didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM.

No.	Sasaran Pokok/ Target Kinerja	Arah Kebijakan				
		Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan teknis administratif bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan regulasi yang berlaku	Meningkatkan kapasitas, ketatalaksanaan dan kelembagaan daerah				
		Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat				
2	Meningkatnya Kompetensi sumberdaya aparatur dari 40% menjadi 80%	Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur				
3	Meningkatnya efektifitas pengelolaan administrasi kepegawaian daerah dari 76,66% menjadi 86,66%	Meningkatkan efektifitas pengelolaan administrasi kepegawaian daerah				
4	Meningkatnya kinerja aparatur dari 40% menjadi 80%	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan sumberdaya aparatur				
5	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja pemerintah daerah yang ditandai dengan opini LAKIP Daerah dari C menjadi A	Meningkatkan kualitas aparatur pengawasan dan pembinaan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah				
		Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas aparatur				
6	Meningkatnya penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil dari 64,40% menjadi 85%	Meningkatkan jumlah jaringan sistem kependudukan di seluruh kecamatan				
		Menyusun data dan informasi kependudukan yang akurat serta meningkatkan pelayanan kependudukan dan catatan sipil				
7	Meningkatnya kinerja pemerintah dalam penyelesaian permasalahan di masyarakat dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku	Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan				
		Mempertahankan keberhasilan aparatur pemerintah dalam melayani warga				
		Menata peraturan perundang-undangan				
		Menata pemanfaatan dan pemilikan lahan				
		Meningkatkan kualitas sistem administrasi perekonomian dan pembangunan				
		Membina BUMD untuk menjadi penggerak ekonomi daerah				
		Meningkatkan sistem administrasi pembangunan daerah				
		Meningkatkan kualitas sistem administrasi umum				

No.	Sasaran Pokok/ Target Kinerja	Arah Kebijakan				
		Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
8	Meningkatnya pembinaan masyarakat di kecamatan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan kemasyarakatan				
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musrenbang				
9	Meningkatnya produk legislasi daerah yang disahkan dari 63,64% menjadi 100%	Meningkatkan kualitas anggota legislatif dan kapasitas lembaga DPRD				
10	Meningkatnya kesesuaian muatan perencanaan daerah dengan implementasi nya dari 70% menjadi 90%	Meningkatkan kualitas data perencanaan daerah				
		Meningkatkan kapasitas perencanaan spasial				
		Meningkatkan perencanaan dan pengendalian pembangunan SDA				
		Meningkatkan kapasitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah				
		Meningkatkan kualitas lembaga dan tenaga perencana daerah				
		Meningkatkan kemampuan perencanaan daerah bawahan				
		Mempertahankan keberhasilan perencanaan pembangunan daerah				
		Meningkatkan pembangunan ekonomi daerah				
11	Meningkatnya kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan awal bencana	Menyediakan rencana aksi penanggulangan bencana daerah serta peningkatan kepedulian masyarakat dalam menghadapi bencana				
		Menangani kejadian bencana sosial				
12	Membaiknya opini laporan keuangan daerah dari WDP menjadi WTP	Meningkatkan mutu laporan keuangan dan ketaatan terhadap standar pengelolaan keuangan daerah				
13	Meningkatnya penerimaan daerah sebesar 60,4% yaitu dari 429,63 miliar menjadi 711,25 miliar	Meningkatkan penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak				
14	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dari 49,40% menjadi 60%	Mengembangkan wawasan kebangsaan dan kesadaran politik masyarakat				
15	Menurunnya indeks kriminalitas dari 112 menjadi 105	Mengendalikan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan peraturan daerah				
		Mengembangkan kapasitas penegak hukum				
		Membina masyarakat untuk ketahanan dan perlindungan				
16	Meningkatnya persentase kearsipan daerah dari 5% menjadi 80% dan berkembang nya minat baca masyarakat	Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas lembaga kearsipan dan perpustakaan daerah				
		Mengembangkan perpustakaan daerah				
17	Terpenuhinya standar aturan ketenagakerjaan	Meningkatkan perlindungan dan pengawasan sistem ketenagakerjaan				
		Menurunkan angka perselisihan pengusaha dan pekerja				
18	Menurunnya jumlah	Meningkatkan jumlah keluarga sejahtera				

No.	Sasaran Pokok/ Target Kinerja	Arah Kebijakan				
		Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
	keluarga pra sejahtera dan sejahtera I dari 23,64% menjadi 22,49%	Meningkatkan ketahanan keluarga				
19	Meningkatnya kapasitas pelayanan aparatur sesuai standar	Disesuaikan masing-masing SKPD				

MISI 5. Melanjutkan pembangunan yang adil dan merata melalui peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang perkembangan di seluruh wilayah Kabupaten Bintan

No.	Sasaran Pokok/ Target Kinerja	Arah Kebijakan				
		Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas jaringan jalan, jembatan, dan drainase	Membangun dan merehabilitasi jalan, jembatan, drainase dan gorong-gorong				
		Memelihara jalan dan jembatan				
		Mengembangkan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman				
		Mengembangkan pelayanan air minum dan air limbah				
		Mengendalikan dampak banjir				
		Meningkatkan perencanaan teknis dan domes rencana bidang kepekerjaan umum				
		Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana umum dan aparatur pemerintahan				
		Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana ibukota				
		Meningkatkan utilitas penerangan di kawasan ruang terbuka				
2	Meningkatnya rumah tangga yang terlayani kebutuhan listrik dari 60,38% menjadi 65%	Menyediakan jaringan dan pembangkit listrik bagi masyarakat				
3	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana wilayah	Meningkatkan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana wilayah				
		Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan				
		Meningkatkan kualitas kebijakan bidang perhubungan				
		Meningkatkan pelayanan angkutan umum				
		Meningkatkan konsolidasi dan koordinasi kepada institusi jasa pos dan telekomunikasi				
		Meningkatkan pembinaan dan pengawasan bidang kebandarudaraan				

MISI 6. Melanjutkan upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan kearifan lokal dan pengarusutamaan gender

No.	Sasaran Pokok/ Target Kinerja	Arah Kebijakan				
		Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
1	Menurunnya persentase penduduk miskin dari 11% menjadi 8%	Menurunkan jumlah penduduk miskin dan meningkatkan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial				
2	Menurunnya persentase penyandang masalah	Meningkatkan bantuan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial				

No.	Sasaran Pokok/ Target Kinerja	Arah Kebijakan				
		Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
	kesejahteraan sosial dari 6,98% menjadi 6,21%	Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat				
		Meningkatkan kompetensi pekerja sosial dan tenaga kerja kesejahteraan sosial				

MISI 7. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (Sustainable Development)

No.	Sasaran Pokok/ Target Kinerja	Arah Kebijakan				
		Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
1	Meningkatnya pengelolaan sumber daya kelautan Kabupaten Bintan	Menyusun struktur, pemanfaatan, dan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang berwawasan lingkungan				
2	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup dari 51,65% menjadi 59,79%	Memenuhi kualitas lingkungan hidup daerah yang sesuai standar				
		Meningkatkan kualitas LH				
		Meningkatkan kualitas masyarakat dalam mengelola SDA dan L				
		Meningkatkan pengendalian LH				
3	Meningkatnya persentase sampah yang ditangani dari 20,50% menjadi 100%	Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan				
4	Meningkatnya luas ruang terbuka hijau yang dikelola dari 1.500 M2 menjadi 17.226 M2	Meningkatkan/ Mempertahankan luas ruang terbuka hijau dan pengelolaan tempat pemakaman umum				
5	Menurunnya kerusakan hutan lindung dari 1658,8 Ha menjadi 9 Ha	Memantapkan dan meningkatkan upaya perlindungan hutan				
		Meningkatkan fungsi DAS				
		Meningkatkan inventarisasi dan dokumentasi sumber daya hutan				
6	Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Peningkatan pengawasan dan pembinaan usaha pertambangan dan pemanfaatan sumber daya air				
		Peningkatan pembinaan dan pengawasan distribusi bahan bakar minyak dan gas bumi				

2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Bintan Tahun 2015

Prioritas pembangunan Kabupaten Bintan Tahun 2015 sebagaimana dicantumkan dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2015, pada dasarnya merupakan upaya penyelesaian secara bertahap atau sekaligus rencana pembangunan daerah dalam kerangka pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan itu sendiri yakni kesejahteraan masyarakat, prioritas pembangunan dimaksud sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berdaya saing, berbudaya serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Pembangunan perekonomian daerah yang berbasis pada pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- 3) Pengembangan potensi pariwisata dan agribisnis;
- 4) Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance), demokratis dan bertanggung jawab didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM;
- 5) Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang perkembangan di seluruh wilayah Kabupaten Bintan;
- 6) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan kearifan lokal dan pengarusutamaan gender;
- 7) Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (Sustainable Development).

Disamping prioritas tersebut diatas juga disejalkan prioritas nasional yaitu: penanggulangan kemiskinan; Peningkatan ketahanan pangan; perbaikan iklim investasi dan iklim usaha; peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana; pembangunan daerah tertinggal, terluar, terdepan dan pasca konflik; serta Pengembangan kebudayaan, kualitas dan inovasi teknologi. Dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun 2015 memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Memperhatikan dan Mempertimbangkan pencapaian tujuan serta sasaran pembangunan millennium (Millennium Development Goals/MDG's).
- 2) Menghadapi tantangan persaingan untuk meraih peluang memasuki bentuk integrasi ekonomi asean yang dikenal dengan Asean Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai pada tahun 2015.
- 3) Antisipasi prabencana, penanggulangan bencana dan pascabencana.
- 4) Mendukung optimalisasi penerapan kurikulum baru tahun 2013 sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah, pembangunan, operasional pemeliharaan, rehabilitasi/renovasi sarana dan prasarana pendidikan, pengadaan alat peraga, peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan.

- 5) Pemenuhan sarana dan prasarana serta peningkatan mutu fasilitas yankes, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, pencegahan penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular, penanggulangan masalah gizi masyarakat, penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) serta mendorong Jamkesda
- 6) Penyediaan dan layanan air bersih setiap rumah tangga, penataan MCK, lingkungan kumuh, sanitasi, persampahan, polusi dan pencermatan air, udara dan tanah dipedesaan dan perkotaan.
- 7) Penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur, jaringan irigasi, waduk dan situ, pengendalian banjir, penataan pelantar dan dermaga, jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan kantong kantong produksi serta membuka keterisolasian untuk kelancaran arus barang dan orang dalam upaya menekan ekonomi biaya tinggi, pembangunan dan penataan pasar tradisional.
- 8) Penataan ruang dan lingkungan hidup dalam upaya pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pencegahan alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan RTRW, Optimalisasi pemanfaatan kawasan budidaya dan pengamanan kawasan lindung, sosialisasi/penyuluhan pemanfaatan ruang dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.
- 9) Penyediaan dan pemanfaatan lahan untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ketersediaan rumah layak huni, menetapkan kebijakan dan strategi dibidang perumahan dan kawasan permukiman.
- 10) Pengembangan kepemimpinan pemuda, peningkatan potensi keteladanan, keberpengaruhan serta menggerakkan pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan yang berwawasan kebangsaan.
- 11) Mendorong, melaksanakan dan memfasilitasi kerjasama dunia usaha di bidang penanaman modal, optimalisasi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di bidang perizinan secara cepat, mudah dan murah.
- 12) Pengembangan usaha ekonomi masyarakat berupa kemudahan akses permodalan, pembinaan manajemen usaha serta pemasaran, pemberdayaan koperasi, pemberdayaan UKM dalam menumbuhkan iklim usaha bagi usaha kecil, fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan UKM.

- 13) Mendorong peningkatan kegiatan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha yang bersifat padat karya untuk mengurangi angka pengangguran dalam rangka pengentasan kemiskinan, pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja, pengawasan pelaksanaan perizinan/pendaftaran lembaga pelatihan kerja, serta penerbitan rekomendasi perijinan magang ke luar negeri, pengawasan pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan pelatihan kerja.
- 14) Penyediaan dan pengendalian ketersediaan pupuk, bibit, obat-obatan pembasmi hama dan sarana produksi pertanian serta peningkatan intensitas tenaga penyuluh pertanian untuk mendukung ketahanan pangan, pencegahan alih fungsi lahan pertanian, pengembangan keanekaragaman produk pertanian, identifikasi kebutuhan ketersediaan pangan.
- 15) Mendorong peningkatan peranan perempuan berpartisipasi dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam upaya mencapai 30% keterwakilan perempuan, perlindungan terhadap perempuan yang responsive gender berupa pemberdayaan, pelayanan kesehatan, mental spiritual, pendidikan, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi dan jual beli anak dan remaja (trafficking) dan kekerasan seksual.
- 16) Dukungan operasional jaminan dan pelayanan keluarga berencana, penyediaan sarana, alat, obat dan cara penggunaan kontrasepsi, penyuluhan keluarga sejahtera, pemberian dukungan kesehatan reproduksi remaja (KRR), pencegahan HIV/AIDS, infeksi menular seksual (IMS) dan bahaya narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA).
- 17) Pengendalian pemberian ijin trayek angkutan mempertimbangkan aspek kelayakan, daya dukung, kemampuan, sarana prasarana perhubungan, kemudahan akses antar moda transportasi.
- 18) Penyebarluasan dan penyuluhan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat serta pengembangan kemitraan media.
- 19) Mendukung terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban, kerjasama dengan seluruh aparat keamanan, organisasi kemasyarakatan dalam pencegahan terorisme dan konflik sosial.

- 20) Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa di bidang usaha ekonomi masyarakat desa, peningkatan teknologi tepat guna (TTG) dalam bidang pertanian dalam arti luas.
- 21) Penanganan masalah sosial seperti pemberdayaan fakir miskin, anak terlantar, PSK, gelandangan dan pengemis, peningkatan penyediaan fasilitas dan pemberian jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik, mental dan lanjut usia, serta menyelenggarakan pelatihan kerja bagi pengangguran dan fasilitasi penempatan pada berbagai bidang usaha sesuai dengan keahlian.
- 22) Perlindungan terhadap cagar budaya, perawatan dan pengamanan asset/benda kesenian, perlindungan, pemeliharaan dan pengamanan benda cagar budaya, pengembangan pemanfaatan kesenian tradisional, penyelenggaraan dan pengelolaan museum daerah, peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait lembaga adat, seni dan budaya daerah.
- 23) Mengintegrasikan pencapaian target kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencakup pelayanan dasar bidang urusan perumahan rakyat, perhubungan, lingkungan hidup, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, ketenagakerjaan, penanaman modal, kesenian dan ketahanan pangan.
- 24) Pencegahan dan pemberantasan korupsi, penanganan gangguan keamanan dalam negeri, pembangunan perbatasan antar Negara, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, pengembangan wilayah, pengembangan ekonomi daerah, penataan perkotaan, pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang, pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan.

- 2.4. Kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional.

Dengan kemajuan dan masalah yang dihadapi hingga tahun 2013 dan perkiraan tahun 2014 maka beberapa tantangan pokok yang akan dihadapi dalam tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Pertama, Sektor pertanian merupakan sektor yang diproyeksi mengalami sedikit peningkatan terutama di bidang perikanan dengan adanya program nasional pembangunan kawasan minapolitan di beberapa pulau di Kabupaten Bintan. Tetapi produksi perikanan maupun pertanian masih sangat terbatas akibat kondisi cuaca yang masih tidak menentu.

Kedua, mengefektifkan pengeluaran pemerintah pada tahun 2014 dan pemanfaatannya diarahkan pada kegiatan-kegiatan produktif yang mendorong berkembangnya peran serta masyarakat. Sementara itu, untuk menahan laju perlambatan ekonomi, dan mengarahkannya pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, perlu dilakukan upaya penguatan ekspor dan pengendalian impor melalui langkah-langkah seperti diversifikasi pasar dan produk serta tujuan ekspor, percepatan perbaikan infrastruktur pendukung ekspor yang belum optimal juga harus terus dilakukan.

Ketiga, meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah yang relatif besar dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya dapat menekan angka pengangguran dan mengurangi jumlah penduduk miskin.

Adapun langkah-langkah atau kebijakan yang diambil untuk menghadapi masalah atau tantangan seperti diuraikan diatas, adalah sebagai berikut :

1. Pemantapan efektivitas pengeluaran daerah melalui peningkatan perencanaan kebijakan APBD, penajaman prioritas anggaran, pengelolaan risiko fiskal peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran melalui pengembangan sistem informasi perbendaharaan, peningkatan pengelolaan kas

daerah, pengelolaan dan pengendalian anggaran, penyelenggaraan dan peningkatan sistem informasi keuangan.

2. Mempercepat fungsi intermediasi dan penyaluran dana masyarakat melalui optimalisasi penyaluran kredit perbankan, termasuk peningkatan akses permodalan kepada UMKM, terbentuknya kerangka pembiayaan mikro, peningkatan peran Bank Perkreditan Rakyat, peningkatan diversifikasi sumber-sumber pendanaan lembaga jasa keuangan non bank melalui pengaturan, pengembangan insentif dan law enforcement, penyempurnaan peraturan perundangan di bidang infrastruktur dan sektor-sektor penting lainnya.
3. Untuk meningkatkan kinerja investasi dalam rangka mengejar pertumbuhan ekonomi diperlukan debirokrasi dalam pelayanan perizinan investasi melalui penyederhanaan sistem dan prosedur, kepastian hukum serta pelaksanaan law enforcement yang konkrit.
4. Dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi juga diberikan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur dan penyediaan energi termasuk listrik.
5. Beberapa kebijakan sektoral yang perlu dilakukan Pemerintah Bintan supaya dapat mencapai target PDRB tahun 2015 adalah :
 - Sektor Pertanian terutama perikanan dan kelautan, dengan tantangan perubahan iklim yang tidak menentu menyebabkan penurunan hasil perikanan laut dari berbagai jenis komoditas perikanan di Kabupaten Bintan. Pengembangan minapolitan di Bintan Pesisir dan Mantang diharapkan sudah bisa menampakkan hasil yang positif pada tahun 2015. Penguatan sektor pertanian oleh kegiatan ekonomi produktif di sektor pertanian atau perdesaan termasuk didalamnya produk agroindustri untuk meningkatkan pendapatan petani sekaligus konservasi lingkungan.
 - Sektor Industri Pengolahan melalui penguatan industri pengolahan khususnya pada industri unggulan di Kabupaten Bintan perlu ditingkatkan kontribusinya terhadap PDRB melalui upaya perbaikan iklim usaha, pengembangan produk, perluasan pasar, aliansi strategi usaha dan pembenahan pada hambatan-hambatan untuk penguatan struktur industri.

- Sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor perdagangan memang merupakan salah satu mata pencaharian yang banyak ditekuni masyarakat di Kabupaten Bintan. Sektor ini didorong juga oleh sektor pariwisata yang potensinya belum digarap secara optimal seperti lokasi-lokasi wisata di Kabupaten Bintan yaitu Lagoi dan lokasi-lokasi wisata lainnya yang saat ini sudah secara rutin dikunjungi oleh wisatawan lokal. Pada tahun 2014 diharapkan adanya peningkatan sarana dan prasarana wisata yang ada untuk meningkatkan jumlah pengunjung, selain itu dukungan promosi dibutuhkan melalui even-even pariwisata agar kunjungan wisatawan semakin meningkat.
 - Sektor lain seperti sektor pertambangan dan galian, sektor listrik gas dan air bersih, sektor bangunan dan konstruksi, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor jasa-jasa, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan sewa bangunan dan jasa perusahaan diupayakan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi sektor-sektor yang berkontribusi utama dalam PDRB Kabupaten Bintan.
6. Peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pembangunan antara lain dengan mendorong pembangunan pertanian dan meningkatkan kegiatan ekonomi pedesaan. Kualitas pertumbuhan juga didukung dengan memperbaiki iklim ketenagakerjaan yang mampu meningkatkan penciptaan lapangan kerja dengan mengendalikan kenaikan upah minimum agar tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan laju inflasi, memastikan biaya-biaya non upah minimum mengarah pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta membangun hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dan tenaga kerja. Kualitas pertumbuhan juga didorong dengan meningkatkan akses usaha kecil, menengah, dan koperasi terhadap sumber daya pembangunan. Upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin akan dilakukan melalui berbagai kebijakan lintas sektor mengarah pada penciptaan kesempatan usaha bagi masyarakat miskin, serta pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

2.5. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pada Tahun Anggaran 2015 arah kebijakan pembiayaan Kabupaten Bintan sebagai berikut :

2.5.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2015 adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) merupakan sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya. Penggunaan SiLPA terutama digunakan untuk menutup defisit anggaran setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan. Atas defisit anggaran yang direncanakan juga dapat ditutupi dengan pinjaman daerah namun Pemerintah Kabupaten Bintan tidak mengambil kebijakan ini.

2.5.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2015 terutama untuk penyertaan modal pemerintah pada Bank BPR Bintan, sedangkan penyertaan modal untuk PT. Bank Riau Kepri sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bintan Kepada PT. Bank Riau Kepri Untuk Tahun 2011 S/D 2014 telah dilaksanakan, sehingga penyertaan modalnya masih menjadi pertimbangan selanjutnya.